



# MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEMANDIRIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)

Nano Prawoto ([prawotonano@yahoo.com](mailto:prawotonano@yahoo.com))  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kosihan Bantul, Yogyakarta

## ABSTRACT

*Research on the development and empowerment of community-based self-reliance to increase community food security Dieng in Central Java province is descriptive investigative research to gain an overview of the problems of economic development community, especially regarding food security. The output of this research program and the completion of strategic activities (strategic plan) an integral and comprehensive in order to improve food security and economic empowerment Dieng community. This research method to apply multiple methods of analysis (multi-methods analysis) is by applying several methods that Quotion Loqation method (LQ), SWOT analysis, trend analysis, and analysis of the Economic Empowerment of the agricultural sub-sector. This study has value and strategic objectives as well as provide important information to improve community food security in particular Dieng and underserved communities in Indonesia in general.*

*Keywords: empowerment, food security, multy analysis method*

## ABSTRAK

Penelitian mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemandirian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat Dieng di provinsi Jawa Tengah merupakan penelitian deskriptif investigatif untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya menyangkut ketahanan pangan. Output dari kegiatan penelitian ini yaitu tersusunnya program dan kegiatan strategik (strategic plan) secara integral dan komprehensif dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng. Metode penelitian ini menerapkan beberapa metode analisis (multi-methods analysis) yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode yaitu metode Loqation Quotion (LQ), analisis SWOT, analisis Trend, dan analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada sub-sektor pertanian. Penelitian ini memiliki nilai dan tujuan strategis disamping memberikan informasi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Dieng khususnya dan masyarakat tertinggal di Indonesia pada umumnya.

Kata kunci: ketahanan pangan, multy method analysis, pemberdayaan

Secara geografis wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbasis pada pengembangan di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kondisi ini ditunjang dengan suatu kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian di pedesaan merupakan langkah konkrit mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata. Apalagi ditunjang dengan kenyataan masih adanya sebagian masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori masyarakat tertinggal seperti Masyarakat Dieng di provinsi Jawa Tengah. Kondisi masyarakat yang terisolasi menyebabkan kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber ekonomi (*resources*) menjadi sangat minim. Keadaan ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Dieng secara umum.

Dengan demikian perlu adanya perlakuan (*treatment*) tersendiri untuk melindungi kehidupan mereka dan memberikan penyuluhan, bimbingan serta pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat Dieng khususnya menyangkut masalah ketahanan pangan. Secara obyektif kelekatan Masyarakat Dieng dengan kondisi lingkungan alamnya – yaitu pertanian dan hasilnya - begitu erat bisa diibaratkan seperti 'ikan dengan air'. Kebutuhan hidup mereka ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam (SDA) terutama di sektor pertanian. Melalui program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng berbasis kemandirian diharapkan dapat melindungi mereka dari resiko kelaparan. Ketahanan pangan merupakan situasi dimana setiap rumah tangga disetiap saat memiliki akses untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan sehat untuk seluruh anggota keluarga. Empat komponen yang harus ada dalam ketahanan pangan yaitu, ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan (Vini & Wulandari, 2008)

Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan yang dapat menjadi panduan dalam merumuskan strategi pembangunan secara terintegrasi terutama menyangkut strategi pengembangan ketahanan pangan masyarakat tertinggal. Melalui perencanaan pembangunan yang terstruktur dapat mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan program-program pembangunan berdasarkan analisis potensi ekonomi yang dimiliki. Penelitian ini dirancang untuk dapat mengidentifikasi permasalahan ekonomi masyarakat Dieng dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat berbasis kemandirian untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan (Achmad, 2012)

Pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh (Yunastiiti, 2008)

Dengan demikian pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin

ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat (Bustanul, 2004).

Modernisasi ekonomi membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan memberikan banyak kemudahan bagi sebagian masyarakat. Namun pada sisi lain ada sebagian masyarakat – terutama masyarakat tertinggal - yang menjadi korban dari derasnya laju pertumbuhan ekonomi karena lemahnya daya tahan ekonomi dan minimnya penguasaan sumber-sumber ekonomi. Keadaan ini akan langsung berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya terutama pangan. Ketahanan pangan bagi masyarakat tertinggal merupakan persoalan krusial bagi pemerintah dan masyarakat karena menyangkut kredibilitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lemahnya posisi tawar (*bargaining power*) suku tertinggal dan kurangnya koordinasi dinas-dinas terkait akan menimbulkan kerawanan dan potensi kelaparan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini membutuhkan berbagai metode (*multi-methods analysis*) yang memberikan gambaran secara komprehensif untuk menjawab permasalahan dalam riset.

1. Metode Riset Investigatif

Dalam rangka menjawab permasalahan kondisi orientasi sosial terhadap komoditi pada sektor ekonomi tradisional dalam hal pemanfaatan teknologi, dilakukan metode investigatif, dimana peneliti berusaha memasuki kondisi sosial setempat melalui observasi dan partisipasi dalam kehidupan mereka.

2. Metode Sumber Data Sekunder

Dalam rangka menjawab permasalahan potensi kelayakan investasi dan potensi pengembangan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat berbasis kemandirian, maka dilakukan analisis kecenderungan terhadap kondisi komoditi pertanian, perkebunan, dan sektor perikanan seperti ketersediaan, lokasi, jarak tempuh dan kondisi fisik sarana, dan ketersediaan sarana.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu:

(1). Analisis SWOT

Model analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Rangkuti tahun 1997. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rusdarti, 2010)

Analisis SWOT atau juga dikenal sebagai analisis situasi adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi atau kebijakan pada suatu sektor ekonomi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Dalam melakukan proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijaksanaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planning*) harus menganalisis faktor-faktor strategis yang dimiliki (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini.

Sehingga analisis SWOT juga dikenal dengan analisis situasi baik secara internal maupun eksternal.

## (2) Analisis Location Quotient (LQ)

*Location Quotient* (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. Dengan analisis LQ dimaksudkan untuk *melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis, sehingga daerah melihat keunggulan sektor yang dapat dijual dan dikembangkan untuk mendorong perekonomian di daerah atau kabupaten*. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Disamping itu, teori ini juga dapat digunakan sebagai indikasi dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi kegiatan perekonomian suatu wilayah (Ambardi & Socia, 2002).

$$LQ = (E_{ij}/E_j)/(E_{in}/E_n)$$

Dimana :

$E_{ij}$  = Kesempatan kerja di sektor i di wilayah j

$E_j$  = Kesempatan kerja di wilayah j

$E_{in}$  = Kesempatan kerja di sektor i di nagara n

$E_n$  = Kesempatan kerja di negara n

Dari rumus tersebut didapatkan hasil perhitungan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jika nilai  $LQ > 1$ , maka wilayah j untuk sektor i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional)
- Jika nilai  $LQ = 1$ , maka wilayah j > untuk sektor i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah = tingkat spesialisasi nasional)
- Jika nilai  $LQ < 1$ , maka wilayah j untuk sektor i tidak ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah < tingkat nasional)

Pada metode ini merupakan hitungan perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional sehingga dapat diketahui komoditi yang prospek dan tidak. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ, dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja, atau hasil produksi, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya serta menimbulkan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis terlebih dahulu (Glasson, 1977).

### (3) Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengkaji keadaan perekonomian daerah pedesaan secara partisipatif (*participatory rural appraisal*) atau PRA merupakan sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Pendekatan lain dalam analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat partisipatif yaitu metode-metode belajar secara partisipatif (*participatory learning methods*) atau PALM yang menekankan pada proses pembelajaran partisipatif masyarakat pedesaan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan ekonomi. Identifikasi permasalahan dan rumusan strategi dalam pemecahan masalah berdasarkan proses partisipasi masyarakat.

## HASIL ANALISIS

### 1. Analisis Basis Ekonomi (*Location Quotion*)

*Location Quotient* (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. Dengan analisis LQ dimaksudkan untuk melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis, sehingga daerah melihat keunggulan sektor yang dapat dijual dan dikembangkan untuk mendorong perekonomian di daerah atau kabupaten.

Pada metode ini merupakan hitungan perbandingan relatif sumbangan nilai tambah/nilai produksi sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah/nilai produksi sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional sehingga dapat diketahui komoditi yang prospek dan tidak. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ, dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja, atau hasil produksi, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

#### a. Sektor dan Sub-Sektor Basis Pendapatan Daerah (PDRB)

Perhitungan nilai basis (*dynamic LQ* dan *static LQ*) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sektor yang menjadi sektor basis di kabupaten Wonosobo adalah sektor Pertanian, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Sektor Pertanian merupakan sektor basis dengan predikat Unggul untuk tiga tahun terakhir tahun 2006 hingga 2008. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi juga merupakan sektor basis dengan predikat prospektif. Kemudian Pada sektor lain di Kabupaten Wonosobo yang merupakan sektor basis adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa adalah sektor unggulan.

Selanjutnya untuk sektor diluar sektor basis adalah sektor non-basis yang meliputi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang tidak spesialisasi di wilayah kabupaten Wonosobo terhadap sektor tertentu dibanding dengan wilayah yang lain atau kabupaten-kabupaten di daerah Propinsi Jawa Tengah.

Sektor pertanian merupakan unggulan di Kabupaten Wonosobo, karena memang daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur dengan kadar air yang cukup melimpah. Selain itu sebagian daerahnya adalah daerah pegunungan yang cocok untuk pengembangan pertanian diluar padi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hortikultura, maupaun subsektor lain seperti peternakan.

Tabel 1. Perhitungan nilai LQ pada sektor dan sub-sektor PDRB di Kabupaten Wonosobo tahun 2006-2008

Lapangan Usaha	2006		2007		2008		Basis	Ket.
	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ	DLQ	SLQ		
Pertanian	<b>2,23</b>	<b>2,39</b>	<b>2,87</b>	<b>2,44</b>	<b>1,68</b>	<b>2,46</b>	Basis	Unggul
Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,65	<b>1,60</b>	0,65	<b>1,72</b>	0,66	NB	
Industri Pengolahan	<b>1,48</b>	0,35	<b>1,17</b>	0,34	<b>2,22</b>	0,35	NB	
Listrik dan Air Bersih	0,12	0,84	0,92	0,83	<b>2,57</b>	0,84	NB	
Bangunan	<b>1,20</b>	0,72	<b>1,45</b>	0,71	<b>1,09</b>	0,70	NB	
Perdag, Hotel dan Restoran	<b>1,66</b>	0,56	<b>1,68</b>	0,56	<b>1,18</b>	0,55	NB	
Pengangkutan dan Komunikasi	<b>1,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,76</b>	<b>1,18</b>	0,66	<b>1,15</b>	Basis	Prospektif
Keuangan sewa dan jasa perusahaan	0,98	<b>1,71</b>	<b>1,40</b>	<b>1,69</b>	<b>1,02</b>	<b>1,66</b>	Basis	Unggul
Jasa-jasa	0,96	<b>1,04</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>	<b>1,22</b>	<b>1,01</b>	Basis	Unggul

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah

Keterangan :

- U = Unggulan, apabila memiliki nilai SLQ dan DLQ lebih dari 1 (satu)
- A = Andalan, apabila memiliki nilai DLQ lebih dari 1 (satu)
- P = Prospektif, apabila memiliki nilai SLQ lebih dari 1 (satu)
- B = Basis, apabila memiliki nilai SLQ lebih dari 1 (satu)

#### **b. Sub-Sektor Basis Komoditas Tanaman Pangan**

Berdasarkan perhitungan LQ yang ada ternyata tanaman Padi kurang berperan dalam perekonomian di Wonosobo karena cenderung masih belum merupakan komoditas basis. Kemudian untuk komoditas Jagung merupakan komoditas basis yang prospektif dengan nilai SLQ lebih besar dari satu. Kemudian untuk komoditas Ubi Kayu dan Ubi Jalar berkecenderungan menjadi sub-sektor basis yang prospektif juga. Dari olah data tersebut jika dikomperasi pada lahan pertanian dan perkebunan memang struktur tanahnya kebanyakan lebih cocok untuk lahan pertanian palawija dengan daerah pegunungan dan berpasir. Secara umum dari semua komoditas tersebut Jagung, ubi jalar dan Ubi kayu adalah komoditas yang mempunyai kestabilan produksinya dan merupakan produk yang prospektif untuk dikembangkan, dan kebutuhan akan bahan baku jagung untuk kepentingan industri pengolahan makanan ringan diperkirakan meningkat sejalan dengan majunya industrialisasi di Jawa Tengah.

Tabel 2. Perhitungan Nilai LQ pada Sub-sektor Tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2008

Wonosobo	2007	2008		Basis	Ket.
	SLQ	SLQ	DLQ		
Padi	0,70	0,63	-0,15	NB	
Jagung	<b>1,70</b>	<b>1,60</b>	0,49	Basis	Prospektif
Ubi Jalar	<b>2,68</b>	<b>3,75</b>	-0,37	Basis	Prospektif
Ubi Kayu	<b>1,31</b>	<b>1,56</b>	-0,99	Basis	Prospektif
Kedele	0,01	0,01	0,55	NB	
Kacang Tanah	0,06	0,10	-9,41	NB	

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah

### c. Sub-Sektor Basis Komoditas Buah-buahan

Berdasarkan hasil perhitungan (Tabel 3) pada nilai LQ pada komoditas buah-buahan, ternyata terdapat 7 (tujuh) komoditas basis di kabupaten Wonosobo, yaitu duku, pepaya, jeruk siam, manggis, durian dan salak. hanya saja dari ke tujuh buah-buahan tersebut merupakan buah yang basis dan prospektif, dan tidak ada satupun yang betul-betul unggulan. Kemudian dari produk basis tersebut ternyata memang produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, sehingga dari segi pemasaran memang relatif mudah. Untuk mengembangkan dimasa depan produk durian dan salak adalah produk yang relatif prospektif mengingat dari sisi iklim daerah Wonosobo mempunyai iklim yang relatif sejuk dan juga kedua produk tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Tabel 3. Perhitungan Nilai LQ pada Sub-sektor Buah-buahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006–2008

Wonosobo	2007	2008		Basis	Ket.
	SLQ	SLQ	DLQ		
Mangga	0,06	0,03	-0,55	NB	
Rambutan	0,73	0,48	0,32	NB	
Duku	<b>7,70</b>	<b>7,05</b>	0,87	Basis	Prospektif
Pepaya	<b>2,66</b>	<b>3,35</b>	0,14	Basis	Prospektif
Pisang	0,83	<b>1,13</b>	<b>2,32</b>	Basis	Prospektif
Nenas	0,00	0,00	0,00	NB	
Jeruk Siam	0,34	<b>1,36</b>	-3,57	Basis	Prospektif
Nangka	0,58	0,48	0,52	NB	
Manggis	0,43	<b>1,82</b>	-4,76	Basis	Prospektif
Durian	<b>3,86</b>	<b>1,71</b>	-0,56	Basis	Prospektif
Sirsak	0,33	0,39	1,68	NB	
Salak	<b>2,41</b>	<b>2,01</b>	0,51	Basis	Prospektif
Semangka	0,00	0,03	0,00	NB	
Apokat	0,33	0,09	0,05	NB	
Jambu Biji	0,51	0,92	<b>3,30</b>	NB	

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah

### d. Sub-Sektor Basis Komoditas Sayur-sayuran

Pada Tabel 4, sub-sektor sayur-sayuran mengindikasikan bahwa produksi kubis, bawang daun dan sawi adalah produksi basis dan unggulan di daerah kabupaten Wonosobo. Produk ini memang cocok dikembangkan di daerah yang mempunyai iklim sejuk dan cenderung tidak panas seperti Wonosobo. Dan produk ini adalah produk yang kebanyakan dikelola oleh petani pedesaan dimasyarakat sana sehingga dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat maka pemerintah daerah perlu tetap mempertahankan produk unggulan tersebut dan sekaligus juga meningkatkan produk basis yang prospektif lainnya, seperti bawang putih, kentang, tomat, boncis, kacang merah, dan labu siam.

Tabel 4. Perhitungan Nilai LQ pada Sub-sektor Sayur-sayuran di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006–2008

Wonosobo	2007		2008		Basis	Ket.
	SLQ	SLQ	DLQ	DLQ		
Kacang Hijau	0,00	0,002	9,255		NB	
Bawang merah	0,00	0,000	0,000		NB	
Bawang putih	<b>3,51</b>	<b>1,961</b>	-5,579		Basis	Prospektif
kentang	<b>1,98</b>	<b>1,519</b>	-12,301		Basis	Prospektif
Kubis	<b>2,79</b>	<b>1,438</b>	<b>2,167</b>		Basis	Unggul
Cabe	0,90	0,669	-5,496		NB	
Tomat	<b>1,65</b>	<b>1,573</b>	-7,825		Basis	Prospektif
Wortel	0,70	0,603	32,143		NB	
Kacang panjang	0,15	0,120	48,352		NB	
Boncis	<b>2,32</b>	<b>1,991</b>	-9,734		Basis	Prospektif
Ketimun	0,33	0,302	-8,167		NB	
Bawang daun	0,23	<b>2,215</b>	<b>1,627</b>		Basis	Unggul
Sawi	<b>2,14</b>	<b>1,000</b>	<b>5,714</b>		Basis	Unggul
Kacang merah	<b>7,92</b>	<b>5,643</b>	-3,506		Basis	Prospektif
Terong	0,82	0,682	-8,283		NB	
Labu siam	<b>2,18</b>	<b>3,166</b>	-13,587		Basis	Prospektif
Bayam	0,06	0,036	<b>1,073</b>		NB	
Kangkung	0,02	0,011	-12,819		NB	

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah

**e. Sub-Sektor Basis Komoditas Peternakan**

Berdasarkan perhitungan LQ pada produksi peternakan di Kabupaten Wonosobo, ternyata produksi yang basis dan unggulan adalah produksi domba. Hal ini sebenarnya sangat menarik mengingat domba adalah ternak produk substitusi dari kambing yang merupakan ternak asli dari daerah ini. Produk lain yang dikatakan basis adalah ternak kerbau dan kambing, namun ternak ini dikategorikan ternak yang basis prospektif. Jika dilihat dari pengadaan pangan untuk ternak ini memang produksi domba, kambing dan kerbau adalah yang paling cocok mengingat bahwa daerah pegunungan adalah daerah yang beriklim sejuk cenderung dingin, sehingga domba, kambing dan kerbau merupakan ternak yang relatif tahan terhadap cuaca dingin, berbeda dengan sapi yang cenderung lebih cocok untuk dikembangkan di daerah yang relatif panas.

Tabel 5. Perhitungan Nilai LQ pada Sub-sektor Ternak nonUnggas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 – 2008

Wonosobo	2007		2008		Basis	Ket.
	SLQ	SLQ	DLQ	DLQ		
Sapi Potong	0,52	0,56	<b>1,99</b>		NB	
Sapi Perah	0,03	0,05	-2,58		NB	
Kerbau	0,79	<b>1,01</b>	-0,28		Basis	Prospektif
Kambing	0,93	<b>1,14</b>	-0,11		Basis	Prospektif
Domba	<b>1,51</b>	<b>1,13</b>	<b>3,40</b>		Basis	Unggul

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah



**f. Sub-Sektor Basis Komoditas Unggas**

Tabel 6. Perhitungan Nilai LQ pada Sub-sektor Ternak Unggas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006–2008

Wonosobo	2007	2008		Basis	Ket.
	SLQ	SLQ	DLQ		
Ayam kampung	<b>1,15</b>	<b>1,98</b>	-0,04	Basis	Prospektif
Ayam daging	<b>1,04</b>	0,38	0,55	NB	
Ayam Telur	0,09	0,05	-1,62	NB	
Itik	<b>1,01</b>	0,94	<b>22,08</b>	Basis	Andalan
Puyuh	<b>2,55</b>	<b>4,43</b>	0,57	Basis	Prospektif

Sumber : Kab. Wonosobo dan Jateng dalam angka 2007 dan 2008, diolah

Dari Tabel 6 diperlihatkan perhitungan nilai LQ pada produksi Unggas di Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2007 dan 2008. dari tabel tersebut ternyata produksi yang basis adalah jenis unggas ayam kampung, itik dan puyuh, walaupun tidak ada satupun yang dikatakan unggulan di daerah ini, namun merupakan produksi yang prospektif dan andalan. Ketiga produksi ini memang sangat cocok dikembangkan di daerah wonosobo dengan iklim sejuk. Berbeda dengan ayam telur dan daging yang merupakan ayam yang kurang tahan terhadap pengakit sehingga dimasa depan pengembangan ayam kampung dan itik adalah merupakan pengembangan yang prioritas di daerah ini.

**2. Analisis Berdasarkan SWOT**

Dalam penyusunan strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terasing berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dilakukan dengan tiga tahap pelaksanaan. Tahap tersebut meliputi; (a) pengumpulan dan manajemen data, baik data internal dan data eksternal, dimana tahap ini telah dilakukan pada bab sebelumnya, (b) tahap analisis data yang berkaitan dengan produk unggulan, pada tahap ini telah dilakukan analisis makro pada sektor produksi di Kabupaten Wonosobo yang meliputi subsektor tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, ternak non unggas dan ternak unggas, (c) tahap penyusunan strategi yang didasarkan pada evaluasi internal dan eksternal sektor dan kemudian akan dilakukan arah kebijakan pengembangan, dan pada akhirnya menemukan program pengembangan.

**a. Strategi Pengembangan Sub-Sektor**

Kemudian secara lebih rinci dilakukan analisis SWOT sub-sektor pertanian pada sektor unggulan dan rekomendasi strategi umum yang bisa dilakukan daerah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama sub-sektor unggulan daerah untuk ketahanan pangan daerah yang mencakup sub-sektor pada sektor pertanian:

Tabel 7. Matriks SWOT Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p><b>STRENGTH (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lahan yang potensi dilihat dari kesesuaian lahan</li> <li>2. Adanya kebijakan umum tentang pengembangan sektor pertanian dan perkebunan</li> <li>3. Jangkauan dengan pasar internasional seperti negara tetangga dekat</li> <li>4. Iklim yang mendukung untuk pengembangan produk</li> </ol>	<p><b>WEAKNES (M)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> <li>3. Kemampuan dan pengetahuan petani dalam mengolah pertanian dan penyerapan teknologi masih rendah</li> <li>4. Pemilikan modal petani masih relatif kecil</li> <li>5. Tingkat kerusakan hasil produksi masih tinggi</li> <li>6. Pemasaran (Pasca Panen) masih minim</li> <li>7. Hasil produksi masih fluktuatif</li> <li>8. Industri pengolahan bahan pokok, seperti jagung, kacang, ubi kayu dan jalar masih rendah</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITY (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklim yang bagus untuk pengembangan pertanian</li> <li>2. Kemajuan yang pesat pada bidang bioteknologi tanaman</li> <li>3. Meningkatnya permintaan pasar hasil pertanian</li> <li>4. Perdagangan bebas memungkinkan investor pengembangan agribisnis</li> <li>5. Bantuan permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan mikro</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Optimalisasi penggunaan lahan yang ada, membuka pasar baru</b></li> <li>2. <b>Peningkatan bidang bioteknologi</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Optimalisasi penggunaan lahan yang ada</b></li> <li>2. <b>Peningkatan industri yang bermuara pada sektor pertanian pangan</b></li> <li>3. <b>Peningkatan sistem pertanian berkelanjutan</b></li> <li>4. <b>Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengembangan pertanian.</b></li> <li>5. <b>Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani</b></li> </ol>
<p><b>TREAT (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keengganan angkatan kerja baru disektor pertanian</li> <li>2. Serangan hama yang menurunkan produksi</li> <li>3. Kemandirian petani masih kurang, sehingga masih banyak menjadi petani garap</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat tani melalui peningkatan SDM petani</b></li> <li>2. <b>pemanfaatan fungsi lahan pertanian sesuai dengan Rencana tata ruang dan wilayah</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan produktifitas kelompok tani</b></li> <li>2. <b>Optimalisasi lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi yang mengakar dari bawah</b></li> <li>3. <b>Peningkatan kesejahteraan petani</b></li> </ol>

Tabel 8. Matriks SWOT Tanaman Buah-buahan dan Sayuran di Kabupaten Wonosobo

<p><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p><b>STRENGTH (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lahan yang potensi dilihat dari kesesuaian lahan</li> <li>2. Adanya kebijakan umum tentang pengembangan sektor pertanian</li> <li>3. Jangkauan dengan pasar</li> <li>4. Iklim yang mendukung untuk pengembangan produk</li> <li>5. Jaminan pemerintah daerah untuk pengembangan investasi</li> </ol>	<p><b>WEAKNES (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Budaya kerja yang belum menunjang akselerasi program</li> <li>3. Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> <li>4. Kemampuan dan pengetahuan petani masih rendah</li> <li>5. Pemilikan modal petani masih relatif kecil</li> <li>6. Koperasi belum berkembang</li> <li>7. Ketrampilan petani yang rendah</li> <li>8. Hasil produksi masih fluktuatif</li> <li>9. Budidaya pembibitan masih kurang optimal</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITY (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya permintaan pasar</li> <li>2. Kemajuan yang pesat pada bidang bioteknologi tanaman</li> <li>3. Tersedianya jalur transportasi</li> <li>4. Perdagangan bebas memungkinkan investor pengembangan agroindustri</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Optimalisasi daerah dalam mendatangkan investor industri olahan buah</b></li> <li>2. <b>Peningkatan jumlah mutu pertanian hortikultura dalam hal kualitas produksi, penanaman</b></li> <li>3. <b>Akses pasar dan pemberdayaan lembaga penunjang</b></li> <li>4. <b>Peningkatan Pengembangan agribisnis</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan petani terhadap tekhnologi pertanian.</b></li> <li>2. <b>Optimalisasi kinerja petugas lapangan dan dinas terkait (pasca panen)</b></li> <li>3. <b>Peningkatan industri kecil produk olahan buah-buahan</b></li> </ol>
<p><b>TREAT (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keengganan angkatan kerja baru di sektor pertanian</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Serangan hama</li> <li>4. Kemandirian petani masih kurang</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan posisi tawar petani melalui jaminan pasar</b></li> <li>2. <b>Peningkatan pembimbingan dan penyuluhan</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penyediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas,</b></li> <li>2. <b>Akses pasar dan pendapatan petani serta</b></li> <li>3. <b>Penguatan kelembagaan ekonomi petani/koperasi petani</b></li> </ol>

Tabel 9. Matriks SWOT Peternakan Di Kabupaten Wonosobo

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p><b>STRENGTH (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lahan yang potensi digunakan untuk peternakan</li> <li>2. Adanya kebijakan umum tentang pengembangan sektor pertanian</li> <li>3. Iklim yang mendukung untuk pengembangan produksi peternakan</li> <li>4. Tersedianya pakan ternak yang sangat banyak terutama non unggas</li> <li>5. Tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah</li> <li>6. Jaminan pemerintah daerah untuk pengembangan investasi</li> </ol>	<p><b>WEAKNES (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>2. Budaya kerja yang belum menunjang akselerasi program</li> <li>3. Program penyuluhan masih kurang menyentuh masyarakat plosok</li> <li>4. Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> <li>5. Kemampuan dan pengetahuan petani masih rendah</li> <li>6. Pemilikan modal petani masih relatif kecil</li> <li>7. Koperasi belum berkembang</li> <li>8. Keterampilan petani yang rendah</li> <li>9. Hasil produksi masih rendah</li> <li>10. Pemodal besar belum memanfaatkan kerjasama dengan para petani</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITY (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trend yang meningkat untuk permintaan pasar</li> <li>2. Waktu luang para petani yang masih tinggi</li> <li>3. Perdagangan bebas memungkinkan investor masuk daerah</li> <li>4. Defisit stok daging untuk mencukupi kebutuhan nasional</li> <li>5. Daerah yang subur sehingga pakan non unggas murah</li> <li>6. Sistem syariah (gaduh) ternak yang sudah berjalan sejak dulu</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Optimalisasi daerah dalam mendatangkan investor ternak</b></li> <li>2. <b>peningkatan bantuan teknis dan pendampingan peternak</b></li> <li>3. <b>Akses pasar dan pemberdayaan lembaga penunjang</b></li> <li>4. <b>Peningkatan Pengembangan sistem kerjasama pemodal dengan peternak</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak</b></li> <li>2. <b>Optimalisasi kinerja petugas lapangan dan dinas terkait</b></li> <li>3. <b>Peningkatan industri rumah potong daging</b></li> <li>4. <b>Optimalisasi bantuan permodalan, dan Bantuan Alat Produksi</b></li> <li>5. <b>Peningkatan program modal bergilir dan program kerjasama dengan pemodal dan bank</b></li> </ol>
<p><b>TREAT (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keengganan angkatan kerja baru di sektor pertanian</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Serangan penyakit khususnya untuk ternak unggas</li> <li>4. Kemandirian petani masih kurang</li> </ol>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan pembimbingan dan penyuluhan ternak yang sehat dan kebal terhadap penyakit</b></li> <li>2. <b>Meningkatkan motivasi kemandirian peternak</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penyediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas</b></li> <li>2. <b>Meningkatkan akses pasar dan pendapatan petani</b></li> <li>3. <b>Penguatan kelembagaan ekonomi petani/koperasi petani</b></li> <li>4. <b>Meningkatkan adil dan program pengembangan oleh dinas peternakan</b></li> </ol>

Tabel 10. Matriks SWOT Usaha Tani Kabupaten Wonosobo

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p><b>STRENGTH (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi pasar tersedia dan dapat di akses</li> <li>2. Luas lahan tersedia cukup luas</li> <li>3. Usaha tani banyak menyerap tenaga kerja</li> <li>4. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung berkembangnya usaha tani</li> <li>5. Kondisi iklim daerah tropis pengunungan yang cocok untuk usaha tani</li> <li>6. Tersedianya bahan baku dan pakan ternak yang memadai</li> </ol>	<p><b>WEAKNES (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana prasarana produksi dan teknologi</li> <li>2. SDM yang terlibat dalam usaha tani belum banyak yang berkwalifikasi profesional</li> <li>3. Teknologi produksi yang digunakan kebanyakan masih tergolong sederhana/tradisional.</li> <li>4. Kemampuan dan agresivitas mengakses pasar para petani masih terbatas.</li> <li>5. kurangnya dukungan pemerintah untuk merangsang dan mempermudah akses pasar.</li> <li>6. Kemampuan permodalan masih terbatas</li> <li>7. Masih terbatasnya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitas pendukung lain bagi produk-produk usaha tani</li> <li>8. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk mendinamisasi dan memajukan usaha tani</li> <li>9. Terbatasnya diversifikasi produk-produk agribisnis</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITY (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan alam dan sumber daya alam lainnya yang mendukung</li> <li>2. Berkembangnya kemajuan teknologi, informasi, transportasi, dan komunikasi saat sekarang</li> <li>3. Tersedianya pasokan bahan baku yang berkelanjutan</li> <li>4. kesadaran masyarakat akan teknologi produksi baru yang modern</li> <li>5. kebijakan perintah yang memihak pada petani</li> </ol>	<p><b>STRATEGI SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pemberdayaan kelompok-kelompok tani</b></li> <li>2. <b>Pengembangan Dunia Usaha sektor pertanian</b></li> <li>3. <b>Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping juga teknologi, manajemen dan lainnya.</b></li> <li>4. <b>Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis bagi pengembangan usaha tani</b></li> <li>5. <b>Pembinaan untuk bidang usaha tani tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama)</b></li> </ol>	<p><b>STRATEGI WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Optimalisasi peningkatan teknologi dasar untuk memproduksi</b></li> <li>2. <b>Optimalisasi bantuan permodalan, dan Bantuan Alat Produksi</b></li> <li>3. <b>Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas dan dibantu oleh pemerintah daerah</b></li> <li>4. <b>Peningkatan kemampuan pelaku usaha (SDM) dan kelembagaannya;</b></li> <li>5. <b>Peningkatan produktivitas dan mutu hasil; kualitas beberapa produk usaha tani masih belum mampu menyesuaikan dengan tuntutan pasar domestik dan internasional</b></li> <li>6. <b>Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman pangan sebagai sumber gizi dan ketahanan pangan;</b></li> <li>7. <b>Peningkatan deversifikasi produk usaha tani</b></li> </ol>

Tabel 10. Lanjutan

TREAT (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya serangan hama dan penyakit</li> <li>2. Kenaikan biaya produksi dari tahun ke tahun yang meningkat</li> <li>3. Harga hasil produksi yang masih rendah dikarenakan adanya kelompok usaha monopoli</li> <li>4. Pertumbuhan ekonomi rendah menyebabkan daya beli rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penggunaan inovasi teknologi budi daya, dan mitra usaha tani.</li> <li>2. Peningkatan infrastruktur dan sarana lainnya dalam menekan biaya produksi</li> <li>3. Perbaiki harga hasil produksi melalui peningkatan manajemen dan mutu produk melalui program pelatihan produksi dan teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (<i>forward linkage</i>), keterkaitan hilir-hulu (<i>backward linkage</i>), modal ventura, ataupun subkontrak.</li> <li>2. Peningkatan sistem kelembagaan diantaranya adalah peraturan daerah yang mendorong dan menjamin berkembangnya usaha tani</li> </ol>

### F. Program Kebijakan

Berdasarkan analisis, kajian dokumen dan survey lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sub-sektor unggulan, andalan maupun prospektif pengembangan ekonomi masyarakat Dieng Kabupaten Wonosobo dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 11. Sektor Usaha, Komoditas Unggulan dan Peluang Usaha di Daerah Dieng Wonosobo

Sektor Usaha	Komoditas		Peluang Pengembangan
	Prioritas Utama	Prioritas	
Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jagung</li> <li>▪ Ubi Kayu</li> <li>▪ Ubi Jalar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Padi</li> <li>▪ Kedele</li> <li>▪ Kacang Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budidaya</li> <li>▪ Pengelolaan</li> <li>▪ Pemasaran</li> </ul>
Tanaman Buah-buahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durian</li> <li>▪ Salak</li> <li>▪ Duku</li> <li>▪ Pepaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jeruk siam</li> <li>▪ Manggis</li> <li>▪ Pisang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budidaya</li> <li>▪ Produk makanan</li> <li>▪ Produk minuman</li> </ul>
Tanaman Sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kubis</li> <li>▪ Sawi</li> <li>▪ Bawang Daun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawang putih</li> <li>▪ Kentang</li> <li>▪ Tomat</li> <li>▪ Kacang merah</li> <li>▪ Labu siam</li> <li>▪ Boncis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budidaya</li> <li>▪ Pengelolaan</li> <li>▪ Pemasaran</li> </ul>
Ternak non-Unggas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Domba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerbau</li> <li>▪ Kambing</li> <li>▪ Sapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan</li> <li>▪ Pengelolaan</li> <li>▪ Pemasaran</li> <li>▪ Produk makanan</li> </ul>
Ternak Unggas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ayam kampung</li> <li>▪ Puyuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Itik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan</li> <li>▪ Pengelolaan</li> <li>▪ Pemasaran</li> <li>▪ Produk makanan</li> </ul>

Sumber : Data Sekunder, diolah

## 1. Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum pengembangan pemberdayaan masyarakat terasing berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi adalah pemberdayaan sistem ketahanan pertanian yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan kemampuan dan kemandirian SDM pertanian dan kelembagaan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan lestari melalui pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat petani.

Sistem ketahanan pertanian dikembangkan mengingat matapencarian mayoritas masyarakat Dieng adalah dari sektor pertanian, dimana sistem ini mampu mengintegrasikan empat subsistem usaha pertanian mulai dari hulu hingga hilir. *Pertama*, subsistem pertanian hulu yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti usaha di bidang pengadaan dan perdagangan sarana pertanian dan perikanan (alat olah lahan pertanian, dan lain-lain) dan sarana budidaya pertanian (benih, pupuk, pakan, obat-obatan, dll). *Kedua*, subsistem *on-farm agriculture* yang merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan produk pertanian primer. Usaha yang masuk ke dalam subsistem ini adalah usaha pertanian produk unggulan dan budidaya produk unggulan. *Ketiga*, subsistem pertanian hilir yang berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, termasuk di dalamnya kegiatan pemasaran. *Keempat*, kegiatan ekonomi terkait yang dikenal sebagai subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa bagi agribisnis pertanian, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah.

## 2. Kebijakan Operasional

Arah kebijakan umum di atas kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan operasional dalam pengembangan sektor unggulan Dieng di Kabupaten Wonosobo meliputi kebijakan yang komprehensif baik pada skala kecil maupun skala luas. Kebijakan yang dapat diidentifikasi untuk arah kebijakan operasional sektor unggulan daerah ada beberapa kebijakan strategis yang merupakan kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan perekonomian daerah yang diarahkan untuk stabilisasi kondisi perekonomian seperti stabilitas harga barang-barang dan jasa, kebijakan tentang pembiayaan dengan suku bunga murah kepada petani.
2. Kebijakan pengembangan kelembagaan masyarakat yang mendorong aktivitas ekonomi sektor unggulan. Kebijakan ini menyentuh kelompok masyarakat, kelompok usaha, maupun koperasi.
3. Kebijakan yang berhubungan dengan infrastruktur yang mendukung terciptanya akselerasi pengembangan sektor unggulan daerah.
4. Kebijakan yang menyangkut kemitraan antara petani atau kelompok petani, usaha kecil dengan usaha besar dalam pengembangan produk unggulan hingga memasarkan hasil produksi.
5. Kebijakan mempromosikan potensi investasi daerah pada produk-produk unggulan daerah.
6. Kebijakan peningkatan kemampuan pengetahuan dan skill kapasitas sumber daya manusia penggerak sektor unggulan.
7. Kebijakan pengamanan ketahanan pangan dengan tetap mempertahankan ketersediaan bahan pokok dan sumber karbohidrat lainnya, serta produk pertanian lainnya untuk menjamin ketersediaan protein, vitamin dan mineral.
8. Kebijakan peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk unggulan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

9. Kebijakan pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis dan agropolitan untuk mengembangkan skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah.
10. Pengembangan, penguatan sistem dan akses pasar produk pertanian melalui pengembangan kemitraan yang saling ketergantungan antara petani dengan pengusaha.
11. Kebijakan pengembangan koperasi dan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil dipedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat petani.
12. Kebijakan pengembangan kajian teknologi tepat guna dalam mendukung upaya peningkatan value added produk unggulan daerah.
13. Kebijakan perluasan lahan sektor unggulan daerah dalam upaya meningkatkan produksi daerah untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
14. Kebijakan stabilisasi harga yang berkaitan dengan produk pendukung sektor unggulan, seperti pupuk, bibit, pestisida, obat-obatan, makanan ternak, dan lainnya.
15. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

### **3. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang dapat dirumuskan, maka berikut adalah program pengembangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini adalah Dinas-dinas yang terkait dalam hal peningkatan dan pemberdayaan masyarakat terasing berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng. Untuk itu perlu diidentifikasi permasalahan ekonomi yang dihadapi, prospek pengembangan dan kendala yang dihadapi pada tiap unit usaha di atas untuk dapat dirumuskan program pengembangan potensi ekonomi atau produk unggulan masyarakat Dieng di Kabupaten Wonosobo. Tabel berikut menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi pengembangan pada bidang usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Tabel 12. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Produk Unggulan di Daerah Dieng Kab. Wonosobo

Sub-sektor	Permasalahan	Program Pengembangan
<b>Tanaman Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>▪ Pemanfaatan lahan tanaman pokok padi masih rendah (bukan unggulan)</li> <li>▪ Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pertanian yang diarahkan pada perluasan areal pertanian dengan memperhatikan keterkaitan penyediaan input, terutama bibit unggul, pupuk dan pestisida</li> <li>▪ Program bantuan bibit unggul pada petani terutama Jagung</li> <li>▪ Program pengamanan pangan melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, pengembangan budidaya pertanian dan perluasan areal pertanian dengan tetap berpegang pada aspek-aspek optimasi dan kelestarian produksi</li> <li>▪ Program peningkatan sarana prasarana kelembagaan ekonomi, fungsi kelompok tani maupun koperasi</li> </ul>



Tabel 12. Lanjutan

Sub-sektor	Permasalahan	Program Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan dan pengetahuan petani dalam mengolah pertanian dan penyerapan teknologi masih rendah</li> <li>▪ Pemilikan modal petani masih relatif kecil</li> <li>▪ Kesejahteraan petani masih rendah</li> <li>▪ Masih rendahnya peningkatan <i>value added</i>, seperti jagung, kacang, ubi kayu dan jalar</li> <li>▪ Pemasaran (Pasca Panen) masih minim</li> <li>▪ Kelangkaan pupuk dan harga yang berfluktuatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program peningkatan SDM petani, pelatihan kemampuan teknis petani</li> <li>▪ Program pengembangan akses modal melalui bantuan pusat dan daerah, maupun akses lembaga keuangan/bank dengan biaya modal yang kecil juga akses investor dan mitra usaha</li> <li>▪ Program pendampingan kemampuan teknis model tanaman tumpangsari</li> <li>▪ Program peningkatan <i>Value added</i> produk unggulan, pelatihan peningkatan skill pembuatan kripik ubi kayu, ubi jalar, maupun olahan jagung</li> <li>▪ Program pengembangan industri berbasis bahan makanan dengan terus mengembangkan turunan produk untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi</li> <li>▪ Program peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan</li> <li>▪ Program pengembangan akses pasar produk pertanian melalui pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dengan pengusaha bukan monopoli</li> <li>▪ Program stabilisasi harga pupuk dengan pengawasan jalur distribusi</li> </ul>
<b>Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Sayur-sayuran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>▪ Budaya kerja yang belum menunjang akselerasi program</li> <li>▪ Kemampuan dan pengetahuan petani dalam penguasaan IPTEK masih rendah</li> <li>▪ Keterampilan petani yang rendah</li> <li>▪ Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> <li>▪ Keberadaan koperasi masih belum optimal mendukung usaha petani</li> <li>▪ Pemilikan modal petani masih relatif kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program bantuan bibit unggul pada petani lahan kebun maupun petani lahan pekarangan</li> <li>▪ Program penyuluhan dan pendampingan usaha tanaman hortikultura pada daerah subur lainnya</li> <li>▪ Pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) berbasis komoditas unggulan</li> <li>▪ Program peningkatan SDM petani, pelatihan kemampuan teknis petani</li> <li>▪ Program pemagangan petani untuk tanaman hortikultura</li> <li>▪ Program studi banding di daerah yang maju pertaniannya</li> <li>▪ Program pemberdayaan usaha bersama melalui kelompok tani, koperasi usaha dan kelompok usaha bersama agribisnis (KUBA)</li> <li>▪ Program pengembangan akses modal melalui bantuan pusat dan daerah, maupun akses lembaga keuangan/bank dengan biaya modal yang kecil juga akses investor dan mitra usaha</li> </ul>

Tabel 12. Lanjutan

Sub-sektor	Permasalahan	Program Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budidaya pembibitan masih kurang optimal</li> <li>▪ Permasalahan pemasaran pasca panen</li>   <li>▪ Pengembangan industri pengolahan hasil tanaman hortikultura masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)</li> <li>▪ Program pengembangan akses pasar produk buah-buahan dan sayuran melalui pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dengan pengusaha</li> <li>▪ Perluasan jaringan informasi dan pangsa pasar, baik domestik maupun internasional</li>   <li>▪ Program promosi daerah dalam mendatangkan investor industri olahan buah</li> <li>▪ Program pengembangan kajian teknologi tepat guna dalam mendukung upaya peningkatan <i>value added</i> produk unggulan daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi daerah setempat</li> <li>▪ Program peningkatan <i>Value added</i> produk unggulan, pelatihan peningkatan skill pembuatan kripik buah-buahan (orientasi ekspor)</li> </ul>
<b>Peternakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi ternak masih belum optimal dan berfluktuasi</li> <li>▪ Sarana produksi masih kurang memadai, khususnya kandang dan pakan</li> <li>▪ Kemampuan manajerial dan penguasaan IPTEK pembudidaya masih relatif rendah</li> <li>▪ Struktur permodalan pembudidaya masih sangat terbatas</li>   <li>▪ Industri pengolahan hasil ternak belum begitu berkembang</li>   <li>▪ Infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) berbasis komoditas unggulan</li> <li>▪ Pengembangan pakan ternak alternatif</li> <li>▪ Pengembangan kerjasama kemitraan dalam penyediaan sarana produksi</li> <li>▪ Pemberdayaan pembudidaya melalui penyuluhan, pendidikan dan latihan (ayam dan puyuh)</li> <li>▪ Pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan, investor dan mitra usaha</li> <li>▪ Pemberdayaan usaha bersama melalui kelompok pembudidaya, koperasi usaha dan Kelompok Usaha Bersama</li> <li>▪ Pengembangan industri pengolahan hasil ternak</li> <li>▪ Pengembangan industri rumah potong daging</li> <li>▪ Pengembangan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah (<i>added value</i>) produk ternak</li> <li>▪ Pengembangan kerjasama dengan investor dan mitra usaha</li> <li>▪ Pengembangan infrastruktur (pasar) untuk peningkatan produktivitas</li> <li>▪ Penguatan sistem pemasaran dan lembaga ekonomi (koperasi, kelompok tani dll)</li> <li>▪ Pengembangan stabilisasi harga dan pasokan</li> <li>▪ Perluasan jaringan informasi dan pangsa pasar, baik domestik maupun internasional</li> </ul>

Sumber : Data Primer dan Sekunder, diolah

Tabel 13. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Produk Pendukung di Daerah Dieng Kab. Wonosobo

Bidang Usaha	Permasalahan	Program Pengembangan
Budidaya tanaman tembakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produktivitas lahan yang bisa ditingkatkan</li> <li>▪ Rendahnya nilai ekonomi hasil panen</li> <li>▪ Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan pinjaman modal usaha dengan syarat ringan</li> <li>▪ Pembangunan sarana pengolahan hasil panen</li> <li>▪ Pembangunan sarana pemasaran</li> <li>▪ Pengembangan jaringan pemasaran</li> <li>▪ Meningkatkan peran Pemda menjadi fasilitator dalam pengajuan proposal bantuan kepada pemerintah pusat</li> </ul>
Industri pengolahan tembakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya stabilitas stok bahan baku</li> <li>▪ Fluktuasi harga bahan baku</li> <li>▪ Rendahnya kualitas dan produktivitas bahan baku lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan koperasi/asosiasi pengusaha/pengrajin/petani tembakau</li> <li>▪ Peningkatan kualitas dan produktivitas bahan baku lokal</li> <li>▪ Peningkatan kapasitas pergudangan bahan baku</li> <li>▪ Pengembangan Pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan</li> </ul>
Budidaya Tanaman Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usia tanaman yang sudah tua</li> <li>▪ Hama dan penyakit tanaman</li> <li>▪ Tingginya harga saprodi</li> <li>▪ Fluktuasi harga cengkeh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peremajaan tanaman cengkeh</li> <li>▪ Pengembangan Pemberian pinjaman modal bagi petani pada saat panen</li> <li>▪ Peningkatan peranan BUMD /koperasi sebagai penyangga harga cengkeh</li> <li>▪ Peningkatan stok saprodi dengan harga terjangkau</li> </ul>
Industri pengolahan cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik produksi yang tradisional</li> <li>▪ Rendahnya kualitas dan produktivitas usaha</li> <li>▪ Terbatasnya jaringan pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi pengolahan cengkeh menjadi produk olahan minyak atsiri, dsb</li> <li>▪ Pengembangan pinjaman modal usaha untuk modernisasi teknik produksi agar produktivitas meningkat</li> <li>▪ Pengembangan jaringan pemasaran</li> <li>▪ Peningkatan kualitas produksi</li> </ul>
Industri Minyak kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimnya minat investor domestik dan asing</li> <li>▪ Rendahnya kualitas infrastruktur</li> <li>▪ Minimnya informasi dan sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi dan promosi potensi ekonomi minyak kelapa</li> <li>▪ Peningkatan kapasitas infrastruktur</li> <li>▪ Pemberian insentif bagi pengusaha</li> <li>▪ Peningkatan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD</li> <li>▪ Kerjasama antara daerah</li> </ul>
Budidaya Tanaman Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya produktivitas tanaman</li> <li>▪ Hama dan penyakit tanaman</li> <li>▪ Pemeliharaan dan pengambilan buah</li> <li>▪ Pengelolaan pasca panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi potensi ekonomi tanaman kelapa</li> <li>▪ Peningkatan teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman</li> <li>▪ Pengelolaan hasil produksi dan pasca panen</li> <li>▪ Peningkatan produktivitas lahan</li> <li>▪ Penanggulangan hama dan penyakit</li> </ul>
Industri Pengolahan Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimnya informasi dan minat ekonomi masyarakat</li> <li>▪ Rendahnya semangat kewirausahaan</li> <li>▪ Minimnya modal usaha</li> <li>▪ Terbatasnya jaringan pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bimbingan teknis pengolahan kelapa menjadi produk-produk makanan dan olahan lainnya</li> <li>▪ Pemberian pinjaman modal usaha</li> <li>▪ Pengembangan jaringan pemasaran</li> <li>▪ Pengembangan semangat kewirausahaan</li> </ul>

**Tabel 13. Lanjutan**

Bidang Usaha	Permasalahan	Program Pengembangan
Budidaya bunga dan Tanaman Hias	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimnya informasi mengenai potensi ekonomi tanaman hias</li> <li>▪ Rendahnya semangat kewirausahaan</li> <li>▪ Terbatasnya modal usaha</li> <li>▪ Terbatasnya jaringan pemasaran</li> <li>▪ Teknik penanaman yang tradisional</li> <li>▪ Hama dan penyakit tanaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bimbingan teknis penanaman dan pemeliharaan tanaman hias yang baik</li> <li>▪ Pengembangan jaringan pemasaran</li> <li>▪ Pemberian pinjaman modal usaha</li> <li>▪ Standarisasi dan sertifikasi produk tanaman hias</li> </ul>

Sumber : Data Primer dan Sekunder, diolah

## REFERENSI

- Achmad S. (2012). *Pedoman pelaksanaan progam kerja dan anggaran badan ketahanan pangan tahun 2012*. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan. No. 001/Kpts/OT.140/K/01/2012.
- Ambardi, U., & Socia, P. (2002). *Pengembangan wilayah dan otonomi daerah*, Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW – BPPT), Jakarta.
- Bustanul A. (2004). *Analisis ekonomi pertanian Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Glasson J. (1977). *Pengantar perencanaan regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusdarti. (2010). Potensi ekonomi daerah dalam pengembangan UKM unggulan di Kabupaten Semarang, *Jurnal JEJAK*, 3(2).
- Vini A., & Wulandari D. (2008). *Peranan wanita dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga di Kabupaten Sleman DIY*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1),71–82.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1),1-27.

## Referensi Data :

- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2006-2009*
- Badan Pusat Statistik, *Propinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2006-2009*